

SKRIPSI

PERANAN SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh :

REGA SUTRA NANDA
145111037

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN (S1)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2018

ABSTRAK

PERANAN SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Oleh : REGA SUTRA NANDA

Di bawah Bimbingan I : Prof.Dr.H.Detri Karya, S.E., MA
Bimbingan II : Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih, M.Si

Penelitian ini dilaksanakan Di Kabupaten Karimun, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor mana saja yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Karimun, dan untuk mengetahui peranan sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja dan angka elastisitas kesempatan kerja di Kabupaten Karimun. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu metode LQ (Location Quotient), metode yang membandingkan PDRB Kabupaten Karimun terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau memberikan nilai LQ yang menunjukkan kegiatan ekonomi bisnis atau non bisnis pada Kabupaten Karimun. Serta menggunakan analisa elastisitas tenaga kerja dalam melihat peranan sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dari sembilan sektor lapangan usaha yang membentuk PDRB Kabupaten Karimun, Sektor yang memiliki $LQ > 1$ terdapat pada sektor pertanian, perdagangan, jasa-jasa, dan transportasi. Dari beberapa sektor ekonomi unggulan yang ada di Kabupaten Karimun sektor jasa-jasa merupakan sektor yang paling berperan dalam menyerap tenaga kerja yaitu dengan angka elastisitas 5,42%.

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, nilai LQ, tenaga kerja

ABSTRACT

THE LEADING SECTOR ROLE OF LABOR ABSORPTION IN KARIMUN DISTRICT, RIAU ISLANDS PROVINCE

By : REGA SUTRA NANDA

Under Mentor I : Prof.Dr.H.Detri Karya, S.E., MA
Mentor II : Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih, M.Si

This research was carried out in Karimun Regency. The purpose of this study was to find out which sectors were the leading sectors in Karimun Regency and to determine the role of the leading sectors in employment and employment opportunity elasticity in Karimun Regency. The data analysis used in this study was quantitative descriptive method, namely the LQ (Location Quotient) method, the method that compares Karimun Regency GRDP to the Riau Islands Province GRDP gives an LQ value that indicates business or non-business economic activities in Karimun Regency. Besides, the analysis of labor elasticity was also applied in order to looking at the role of the leading sectors in employment absorption in Karimun Regency. From the results of this study, it is known that from nine business sectors that make up the Karimun Regency GRDP, the sectors that have $LQ > 1$ are in the area of agricultural, trades, services, and transportation sectors. In conclusion, one of the superior economic sectors in Karimun Regency, the services sector is the sector that has the most role in absorbing labor, namely the elasticity of 5.42%.

Keywords: Economic Growth, GDP, LQ value, labor

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada saya selaku penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERANAN SEKTOR UNGGULAN DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KARIMUN”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan dengan setulus – tulusnya terimakasih dan penghargaan kepada pihak yang membantu dan memberikan motivasi, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Abrar, M.Si, AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
2. Bapak Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Ibu Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi dalam menentukan konsep utama penyusunan proposal outline ini
4. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak saran, perbaikan dan motivasi demi kesempurnaan penyusunan proposal ini

5. Seluruh Dosen penguji yang telah memberikan arahan dan saran yang sangat membangun dalam perbaikan proposal outline ini
6. Ucapan terima kasih yang tiada tara kepada Orang Tua (Nurizal selaku Ayah saya, Aida selaku Ibu saya) adik saya (Rindy Nurfitri) yang selalu memberi motivasi, Doa, dukungan material, nasihat, perhatian, dan kasih sayang kepada saya selaku penulis
7. Ucapan terimakasih kepada saudari Nova Rumintang yang telah memberikan motivasi, saran yang begitu menguatkan
8. Ucapan terima kasih kepada sahabatku Jimmi Saputra, Erdiyanta, Indra Rifaldi, Irwansyah, Andri Prayoga, dan Adi Putra, yang telah memberi dukungan penyemangat bagi penulis
9. Terima kasih juga buat teman – teman EP angkatan 2014 yang memberikan dukungan selama masa – masa indah perkuliahan, kalian juga merupakan hadiah indah yang Tuhan jumpakan dengan saya

Atas semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan berkat kepada mereka semua dan mudah – mudahan outline ini bermanfaat.

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis

REGA SUTRA NANDA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Teori dan Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	10
2.1.2 Sektor Ekonomi Unggulan	15
2.1.3 Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan.....	16
2.1.4 Penawaran Tenaga Kerja.....	19
2.1.5 Permintaan Tenaga Kerja	20
2.1.6 Angkatan Kerja	21
2.1.7 Pekerja dan Penganggur	21
2.1.8 Bukan Angkatan Kerja	23
2.1.9 Kesempatan Kerja	24
2.1.10 Penyerapan Tenaga Kerja.....	24
2.1.11 Sektor Pekerjaan.....	25
2.1.12 Sektor Unggulan Berperan Besar dalam Penyerapan Tenaga Kerja	25
2.2 Penelitian Sebelumnya	26
2.3 Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	29

3.2 Jenis dan Sumber Data	29
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisa Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Lokasi Penelitian	32
4.2 Sejarah Kabupaten Karimun	34
4.3 Visi Kabupaten Karimun	35
4.4 Perekonomian Kabupaten Karimun	35
4.5 Penduduk Kabupaten Karimun	36
4.6 Penduduk dan Aspeknya	37
4.7 Perkembangan Penduduk	37
4.8 Penyebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk	38
4.9 Penduduk Menurut Mata Pencaharian	40
4.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Sektor Unggulan Kabupaten Karimun	45
5.1.1 Analisis Sistem LQ untuk Mengetahui Sektor Unggulan	45
5.1.2 PDRB Persektor Ekonomi	48
5.1.3 Perkembangan PDRB Sektor Ekonomi Unggulan	50
5.2 Peranan Sektor Unggulan Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Karimun	54
5.3 Pembahasan	55
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	60
6.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : PDRB Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017	4
Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun yang Bekerja dirinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017	6
Tabel 2.1 : Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 4.1 : Kecamatan di Kabupaten Karimun Menurut Luas dan Persentase Wilayah	33
Tabel 4.2 : Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2017	38
Tabel 4.3 : Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun dirinci per Kecamatan Keadaan Akhir Tahun 2017	39
Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Karimun Tahun 2017	41
Tabel 4.5 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun Tahun 2013-2017	43
Tabel 4.6 : Distribusi PDRB Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017	43
Tabel 5.1 : Local Quotient (LQ) Kabupaten Karimun tahun 2013-2017	47
Tabel 5.2 : PDRB Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017	48
Tabel 5.3 : PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017	49

Tabel 5.4 : Pertumbuhan PDRB per Kapita Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Karimun Tahun 2013-2017.....	52
Tabel 5.5 : Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Karimun Tahun 2013-2017	53
Tabel 5.6 : Persentase Tenaga Kerja Sektor Unggulan di Kabupaten Karimun Tahun 2013-2017	53
Tabel 5.7 : Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Karimun Tahun 2013-2017.....	54
Tabel 5.8 : Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun Tahun 2013-2017.....	55
Tabel 5.9 : Hasil Perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja Kabupaten Karimun.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap perekonomian pada suatu negara selalu mengharapkan agar tingkat pertumbuhan ekonominya selalu kuat sehingga penggunaan tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lain secara sepenuhnya selalu akan dicapai dari satu periode ke periode lainnya (Sukirno, 2001 ; 64). Menurut (Tarigan 2005 ; 5) menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah : *full employment, economic growth, price stability*.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, untuk itu sangat diharapkan kemampuan pemerintah daerah dalam menganalisis potensi ekonomi di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan mampu menentukan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian tumbuh lebih cepat.

Menurut Sukirno, (2011 ; 9) pembangunan ekonomi juga merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Selain itu menurut Tornado, pembangunan memiliki tiga tujuan yaitu; (Tornado,1984 ; 8)

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas penyebaran barang kebutuhan pokok seperti makanan, tempat bernaung, kesehatan dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat.
2. Meningkatkan taraf hidup yang meliputi ketersediaan lebih banyak lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai , budaya dan nilai manusiawi, dan
3. Memperluas raga pilihan ekonomi dan social bagi pribadi maupun bangsa dengan memerdekakan mereka dari perbudakan dan ketergantungan, tidak saja dalam hubungannya dengan orang dan bangsa asing, namun juga dari kebodohan dan kepapanan manusia.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah agar perekonomian daerah tumbuh lebih cepat adalah melalui pengembangan sektor - sektor potensial yang mempunyai nilai ekonomi. Masing - masing daerah dapat menetapkan sektor atau komoditi yang di prioritaskan sesuai dengan potensi daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan atau kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting, sektor yang memiliki keunggulan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Suatu daerah dapat di katakan maju apabila di tunjang dari segi pengetahuan masyarakat yang tinggi, adanya sumber daya alam yang cukup memadai dan di kelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar guna tercapainya

kemajuan pembangunan daerah. Salah satu indikasinya adalah minimnya pengangguran di daerah tersebut, apabila pengangguran dapat ditekan sedemikian rupa maka bisa dikatakan daerah tersebut telah bisa memanfaatkan sumber daya manusianya untuk masuk ke dalam sektor-sektor perekonomiannya guna meningkatkan pembangunan daerah.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berkaitan dengan pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun memiliki potensi sumber daya tenaga kerja yang cukup memadai. Penduduk Kabupaten Karimun kurang lebih 229.194 jiwa pada tahun 2017, dari jumlah itu, 47% merupakan angkatan kerja usia produktif. Dengan banyaknya industri yang berkembang di Kabupaten Karimun diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang besar. Sektor tersebut akan ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto masing – masing sektor yang ada di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel 1.1 pada halaman berikut.

Dari tabel tersebut tergambar bahwa struktur ekonomi Kabupaten Karimun tahun 2013-2017 di dominasi oleh 3 (tiga) sektor. Sektor tersebut yaitu sektor perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Bahkan dominasi ketiga sektor tersebut cenderung naik setiap tahunnya. Besarnya kontribusi tersebut semakin meningkat hingga tahun 2017. Dengan memperhatikan peran yang besar dari ketiga sektor tersebut diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang dapat mendorong roda perekonomian di Kabupaten Karimun.

Table 1.1 PDRB Kabupaten Karimun Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian,Kehutanan dan Perikanan	1.342.153.89	1.461.163.59	1.606.078.30	1.742.746.58	1.887.821,19
2	Pertambangan dan penggalian	902.689.52	977.445.38	1.063.092.55	1.130.541.95	1.275.616,56
3	Industri Pengolahan	1.110.983.82	1.224.271.13	1.375.820.14	1.519.740.89	1.664.815,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	23.742.87	23.152.39	24.452.91	28.961.47	34.553,02
5	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	3.286.27	3.655.51	4.107.37	4.482.41	4.882,50
6	Konstruksi	1.202.722.70	1.373.038.05	1.553.413.14	1.709.317.12	1.860.689,82
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.303.083.93	1.502.311.09	1.710.801.99	1.934.614.09	2.085.986,79
8	Transportasi & Pergudangan	263.480.92	321.904.73	383.395.95	440.434.69	498.197,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	153.655.21	171.058.28	193.890.27	214.835.52	272.597,90
10	Informasi dan Komunikasi	227.004.97	241.108.82	259.678.82	276.811.43	334.573,81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	130.118.85	143.554.60	161.069.66	173.421.16	185.724,16
12	Real Estate	243.554.43	270.595.43	300.866.45	335.983.68	369.057,51
13	Jasa Perusahaan	1.071.51	1.211.94	1.373.48	1.531.52	1.675,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	314.109.41	345.551.40	377.644.47	407.397.28	437.756,09
15	Jasa Pendidikan	268.097.23	290.284.85	317.573.83	347.209.86	377.268,67
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	125.760.68	138.881.47	153.885.27	169.213.71	199.272,52
17	Jasa Lainnya	117.666.08	128.872.56	144.800.82	159.386.87	189.445,68
Total		7.733.182.29	8.618.061.21	8.618.061.21	10.596.630.21	11.679.934,59

Sumber : BPS Kabupaten Karimun 2017

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dana investasi, parasarana, tingkat inflasi, kualitas pengusaha (UKM), struktur industry, IPTEK, sifat hubungan antar pemerintah dan swasta, sumber alam, penduduk dan tak kalah pentingnya adalah faktor lokasi dan struktur kegiatan ekonomi regionalnya.

Pembentukan struktur ekonomi melalui pembangunan sektor yang potensial diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui penciptaan lapangan kerja yang baru atau penyerapan tenaga kerja pada sektor - sektor yang potensial tersebut dengan cara mendorong tumbuhnya peranan setiap sektor yang berkaitan dengan skala ekonomi wilayah. Adanya perubahan struktur ekonomi di daerah berarti memungkinkan untuk dapat terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang. Karena perekonomian suatu Negara akan tetap stabil dan kuat jika angka pengangguran di Negara tersebut berkurang serta masyarakat yang ada sejahtera baik dari sistem pendidikannya, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur yang memadai

Kabupaten Karimun yang dikenal dengan “Bumi Sera san Sekundang” merupakan wilayah yang memiliki luas 912,75 km², dengan luas daratan 1.524 km², dan memiliki 12 kecamatan, 42 desa dan 29 kelurahan, dengan sektor pertambangan sebagai leading sektor yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian wilayah, hal ini tentu saja harus dibarengi dengan penyerapan tenaga yang lebih baik, karena bagaimanapun juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup dalam pengembangan perekonomian suatu daerah tanpa diiringi oleh penggunaan tenaga kerja yang tinggi (*full employment*) demi

tercapainya tujuan utama dari kebijakan ekonomi. Pengembangan sektor-sektor ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi ini diharapkan mampu membawa perekonomian Kabupaten Karimun sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau kearah yang lebih baik.

Partumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada beberapa aspek terhadap pembangunan. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Kedua, kemakmuran yang meningkat dan pemerataan pendapatan masyarakat yang baik sehingga bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Penduduk Kabupaten Karimun telah mencapai 229.194 jiwa pada tahun 2017 hal ini menunjukkan suatu tingkat pertambahan yang besar di Kabupaten Karimun. Untuk lebih jelas mengenal jumlah penduduk menurut lapangan usaha utama di Kabupaten Karimun dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada table berikut.

Table 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Yang Bekerja Dirinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017 jiwa

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	39.220	38.973	37.748	37.770	35.923
2	Pertambangan	1.426	1.436	1.320	1.476	1.391
3	Industri Pengolahan	14.959	15.254	15.255	15.540	17.008
4	Listrik	252	289	288	357	393
5	Konstruksi	6.349	7.280	8.208	7.978	8.136
6	Perdagangan	24.105	24.829	25.686	26.689	28.173
7	Transportasi	5.096	5.113	5.106	5.608	5.759
8	Keuangan	2.898	3.031	3.266	3.531	3.752
9	Jasa – jasa	18.451	18.420	17.938	19.459	20.481
Total		112.761	114.628	114.819	118.411	121.022

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2017

Dari tabel tersebut tergambar bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak dalam menyerap tenaga kerja dilihat dalam tahun 2013-2017, namun sektor perdagangan yang mengalami peningkatan setiap tahun dalam penyerapan tenaga kerja, selain sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor jasa kemasyarakatan juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Karimun ialah pusat kegiatan pertanian dan sebagai pusat perdagangan sehingga kebijaksanaan umum pembangunan bidang ekonomi pada sektor pertanian, perdagangan, jasa yang diarahkan untuk memacu pembangunan dan pengembangan sektor-sektor lainnya. Tetapi sektor yang paling berperan terhadap pembangunan ekonomi ialah sektor pertanian, perdagangan, dan jasa, jumlah tenaga kerja pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan di dua sektor yaitu sektor perdagangan, dan jasa-jasa tetapi untuk sektor pertanian mengalami penurunan jumlah tenaga kerja.

Untuk melihat peranan sektor ekonomi unggulan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun ini penulis melalui penelitian dengan judul: “PERANAN SEKTOR UNGGULAN DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KARIMUN”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sektor apa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Karimun?
2. Seberapa besar peran sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun?

1.3. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja sektor unggulan di Kabupaten Karimun”.

1.4. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dalam ini penelitian ini yaitu :

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan pihak instansi terkait khususnya peranan sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja.
2. Menjadi tambahan referensi, bahan, pedoman dan juga sebagai penyempurnaan penelitian ilmiah bagi peneliti berikutnya yang mengangkat penelitian dengan konsep yang sejenis dan pengembangan dari penelitian ini.
3. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan pada Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan proposal ini, maka penulis membaginya dalam enam bab, dimana pada masing-masing bab yang semuanya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan kerangka tulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

Dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut, diantaranya pengertian industri, pertambangan, dan konsep-konsep tentang tenaga kerja serta hipotesis yang perlu diuji kebenarannya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metodologi penelitian yang meliputi teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta analisis data.

BAB IV KEADAAN DAERAH DAN LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang gambaran umum dari daerah yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dari pelaksanaan, penyajian dan analisis data hingga pembahasan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan memberi kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori dan Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiscal yang terjadi disuatu wilayah atau negara seperti penambahan jumlah produksi barang industry, perkembangan insfrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan swbagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestic bruto (GDP), atau pendapatan perkapita (Muana Nangga,2005:27)

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Dalam pemahaman produk domestic bruto (PDB), yang berarti peningkatan pendapatan nasional (Tambunan,2006'59)

Produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik regional bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Produk domestic regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar konstan menunjukkan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan sebagai alat untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut (Sukirno, 2004:429).

a. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu wilayah terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila negara mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat. Kemungkinan untuk memperoleh keuntungan tersebut akan menarik pengusaha dari negara lain yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan tersebut.

b. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan suatu negara menambah produksi disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi.

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi. Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi dibandingkan dengan wilayah atau negara yang masih berkembang.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Didalam menganalisis mengenai masalah-masalah pembangunan di negara berkembang para ahli ekonomi mengatakan bahwa setiap system social dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan yang ada di daerah yang mungkin layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkeselamatan (Suparmoko, 2002:99)

Dengan demikian apabila kemampuan ekonomi ini terus dikembangkan secara terus menerus akan dapat menunjang pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu daerah, maka strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan usaha daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada di daerah, langkah-langkah yang dapat ditempuh (Suparmoko, 2002:99).

- a. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor
- b. Mengidentifikasi sektor-sektor potensinya yang rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut dikembangkan
- c. Selanjutnya mengidentifikasi sumber daya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) dan yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor bersangkutan
- d. Dengan menggunakan modal pembobotan terhadap variable-variable kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan subsektor, maka akan ditemukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
- e. Akhirnya menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang akan dapat menarik sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dapat dilihat melalui dua pendekatan (Dahiri ,2004:50).

- a. Teori Sektor

Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan dan perekonomian nasional dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam 3 sektor utama yaitu

primer, sekunder dan tersier. Perkembangan wilayah ditandai oleh penggunaan sumber daya dan manfaatnya yang menurun di sektor primer, meningkat disektor tersier, dan meningkat sehingga pada suatu tingkat tertentu disektor sekunder.

b. Teori Tahapan Perkembangan

Teori dianggap lebih mengadopsi unsur special dan sekaligus menjembatani kelemahan teori sektor. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapat digambarkan melalui 5 tahapan, yaitu : tahapan spesialisasi ekspor, tahapan ekspor kompleks, tahapan kematangan ekonomi, tahapan pembentukan metropolis, tahapan kemajuan teknis dan professional.

Perubahan struktural (transformasi ekonomi) mengandung arti peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern yang mencakup peralihan lembaga, sikap social, dan motifasi yang ada secara radikal. Perubahan struktural semacam ini menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak dan produktivitas buruh, stok mahal, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. (Jhingan,2004:43) indikator penting yang digunakan untuk mengukur olah perubahan struktur ekonomi adalah distribusi kesempatan kerja menurut sektor, pada tingkat pendapatan perkapita rendah (terhadap awal pembangunan ekonomi), sektor-sektor primer merupakan kontributor besar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tingkat pendapatan perkapita tinggi (tahap akhir sektor-sektor sekunder) terutama industri menjadi sangat penting dalam penyediaan kesempatan kerja. (Tambunan, 2001;65).

2.1.2 Sektor Ekonomi Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan/kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan atas seberapa besarnya peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah (Sambodo,2008;1), komoditas unggulan yang bias menjadi motor penggerak pembangunan suatu daerah, diantaranya :

- a. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya komoditas unggulan dapat memberi kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran
- b. Komoditas unggulan mempunyai ketertarikan ke depan dan ke belakang yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya.
- c. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan

Salah satu metode untuk mengetahui mana yang mana sektor unggulan dan mana yang bukan sektor unggulan di suatu daerah dapat dipakai metode Location Quotient yaitu merupakan indeks harga yang membandingkan sumbangan dalam persen aktivitas tertentu dengan sumbangan dalam persen beberapa agensi dasar. Location Quotient dapat dihitung dari rasio yaitu seperti berikut ini :

$$LQ = \frac{\text{Persentase Employment Regional Dalam Industri A}}{\text{Persentase Employment Nasional Dalam Industri B}}$$

Jika nilai LQ lebih besar dari pada satu berarti laju pertumbuhan sektor di daerah tersebut lebih besar disbanding dengan laju pertumbuhan pada sektor yang sama di daerah lain, jika nilai $LQ=1$ maka laju pertumbuhan sektor di daerah tersebut sama dengan laju pertumbuhan sektor yg sama di daerah yang sama, dan jika LQ kurang dari satu maka sektor tersebut bukan sektor unggulan di daerah dan tidak berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian.

2.1.3 Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia (Human resources) mengandung dua pengertian :
(Simanjuntak, 2001:1)

1. Sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.
2. Sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan suatu kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, dimana kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan professional dan kematangan kepribadian seorang memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan

prilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan persyaratan dalam membentuk profesionalisme.

Minimal ada empat kebijaksanaan pokok dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas hidup yang meliputi kualitas manusianya seperti : jasmani, rohani dan kejuangan, mempunyai kualitas kehidupannya seperti perumahan dan permukiman sehat
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan.
- 4) Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang bersifat lintas sectoral. Secara operasional, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di laksanakan melalui sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan social, kependudukan tenaga kerja dan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Adapun kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup, antara lain meliputi :

1. Pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa mendatang, dalam arti responsive terhadap dinamika pembangunan dan permintaan pasar kerja, sehingga sesuai dengan kebutuhan (demand driven).

2. Pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat, serta memperluas cakupan dan mutu kesehatan.
3. Untuk penduduk miskin, peningkatan kualitasnya di lakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif, serta mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepaskan diri dari kemiskinan.

Tenaga kerja (man power) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja adapun pengertian tenaga kerja itu sendiri dapat dikemukakan sebagai berikut:

$$\text{Tenaga Kerja} = \text{Angkatan Kerja} + \text{Bukan Angkatan Kerja}$$

Tenaga kerja itu sendiri pada dasarnya adalah manusia yang berdimensi banyak, baik manusia secara fisik, intelektual, maupun moral, dimana tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang cukup penting dalam mengkombinasikan serta mengatur setiap tindakan yang akan dilakukan, sehingga dapat merubah atau menciptakan barang-barang atau jasa yang lebih berguna yang mempunyai nilai yang tinggi dari yang sebelumnya.

Menurut (Suroto, 2000:16-17) tenaga kerja (man power) adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan, sedangkan pekerjaan adalah kegiatan manusia untuk memperoleh pendapatan. Dengan demikian pembinaan tenaga kerja adalah usaha untuk memperluas atau meningkatkan kemampuan manusia agar dapat lebih efektif dalam melakukan pekerjaan.

Sementara itu menurut (Simanjuntak, 2001:2) “tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja dengan batas umur yang digunakan di Indonesia dewasa ini adalah

10 tahun” . menurut undang-undang ketenagakerjaan (UU RI No. 13,2003;4), “ tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan, baik untuk menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Sedangkan menurut Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau (2004;8), “ tenaga kerja adalah penduduk yang di pertimbangkan cukup usia untuk bekerja (penduduk usia 15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi, baik yang telah bekerja maupun yang sedang mencari kerja.

Dalam beberapa publikasi yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik pada umumnya menyebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun keatas, yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan penduduk diluar usia kerja adalah golongan penduduk berusia dibawah 10 tahun.

Oleh karena itu pendefenisian penduduk usia kerja sebenarnya memerlukan pemikiran yang komprehensif dan mendalam agar dapat mengakomodasikan berbagai kebutuhan. Sebagai bahan pertimbangan barang kali penduduk usia kerja dapat diartikan adalah penduduk di luar usia kerja tertentu yang layak dan mampu bekerja. Sedangkan penduduk di luar usia kerja adalah kelompok yang dianggap belum layak dan mampu bekerja.

2.1.4 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Dalam jangka pendek, analisis penawaran

tenaga kerja menganggap bahwa tidak ada perubahan jumlah populasi tenaga kerja maupun perubahan tingkat upah terhadap jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dapat digunakan efek pendapatan. Melalui efek substitusi, perubahan upah menyebabkan pada opportunity cost bersantai sehingga menghabiskan waktu untuk bersantai lebih mahal yang pada akhirnya mengurangi santai dan mengurangi waktu santai dan menambah jam kerja. Sementara itu efek pendapatan kenaikan upah berarti kenaikan pendapatan, dengan demikian menganggap waktu santai sebagai barang normal maka pendapatan berarti kenaikan konsumsi waktu santai sehingga menurunkan jam kerja. Total efek dari kenaikan upah terhadap jumlah jam kerja atau penawaran tenaga kerja sangat tergantung dominasi masing-masing efek, jika efek substitusi lebih dominan dari efek pendapatan maka kenaikan upah akan menaikkan penawaran tenaga kerja, dan sebaliknya. (Rokhedi, 2012:3)

2.1.5 Permintaan Tenaga Kerja

Adalah hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, dimana hubungan keduanya bersifat negative. Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari permintaan barang dan jasa, permintaan tenaga kerja dapat dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permintaan dalam jangka pendek menganggap bahwa tenaga kerja bersifat variable sedangkan input lainnya dianggap tetap.

Sementara itu permintaan dalam jangka panjang menganggap bahwa semua tenaga kerja dan semua input lainnya bersifat variable. Permintaan tenaga kerja dapat

dilakukan oleh individu perusahaan maupun oleh pasar tenaga kerja yang merupakan kumpulan semua individu perusahaan. (Rokhedi,2012:76)

2.1.6 Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah sebagian atau seluruh penduduk yang sedang berada dalam usia kerja baik yang sudah mempunyai pekerjaan maupun yang belum, tetapi secara aktif atau pasif mencari pekerjaan.

Berdasarkan penyedia (supply), angkatan kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Sebagian dari mereka ada yang sudah aktif dalam usaha yang bersifat menghasilkan barang dan jasa, mereka ini yang disebut sebagai golongan yang bekerja. Sedangkan yang sebagian yang tidak aktif (pasif), namun siap bekerja atau pengangguran (Suroto,2007:7). Jadi dapat dikatakan bahwa angkatan kerja adalah jumlah pencari kerja (penganggur) ditambah yang sudah bekerja.

$$\text{Angkatan Kerja} = \text{Pekerja} + \text{Pengangguran}$$

2.1.7 Pekerja Dan Penganggur

Tiap negara mempunyai pengertian yang berbeda mengenai definisi bekerja dan menganggur, dan definisi tersebut dapat berubah menurut waktu. Dalam sensus suksesnya tahun 2011, orang yang bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan paling sedikit dua hari dalam seminggu sebelum hari pencacahan data dinyatakan sebagai pekerja. Penduduk dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga

kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu pekerja penuh dan setengah menganggur. Pengangguran dibagi menjadi dua yaitu setengah menganggur kentara dan setengah menganggur tidak kentara. Semua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu wilayah tertentu selama enam bulan atau lebih atau berdomisili kurang dari enam bulan.
- b. Tenaga kerja, yaitu setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).

Juga tergolong sebagai pekerja, mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan dan tidak bekerja atau bekerja kurang dari dua hari seperti : (Simanjuntak, 2001:5)

- 1) Pekerja tetap pada suatu kantor pemerintahan atau swasta yang tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok, atau mangkir.
- 2) Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang sedang tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap lahan pertaniannya.
- 3) orang yang bekerja didalam bidang keahlian seperti dokter, konsultan, tukang cukur dan lainnya.

Sebaliknya penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran adalah perbandingan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persen.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

2.1.8 Bukan Angkatan Kerja

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas tiga golongan yaitu :
(Simanjuntak, 2001:6)

1. Golongan yang masih bersekolah, yaitu mereka yang kegiatannya hanya bersekolah.
2. Golongan yang mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah.
3. Golongan lain-lain.

Adapun yang tergolong lain-lain ada dua macam yaitu :

- 1) Penerima pendapatan, yakni mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pension, bunga atau sewa atas kepemilikan.
- 2) Tidak menerima pendapatan, yakni mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia, cacat, dalam penjara atau penyakit kronis.

2.1.9 Kesempatan Kerja

Pada hakikatnya jumlah angkatan kerja yang ada di tengah kehidupan masyarakat lebih besar jika dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan kesempatan kerja itu sendiri. Pertumbuhan kesempatan kerja hanya dapat dicapai dengan pengembangan sumber daya manusia dan memperluas kegiatan ekonomi dengan usaha meningkatkan produktivitas. Dengan demikian banyak tenaga kerja yang diserap sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia di tengah-tengah kehidupan masyarakat telah ditempati, maka dapat dikatakan sebagai kesempatan kerja (Sumarsono, 2003:41).

Menurut biro pusat statistic provinsi riau menyatakan bahwa kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian kesempatan kerja mencakup pekerjaan yang sudah di isi dan semua pekerjaan yang masih ada lowongan.

2.1.10 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam satu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Dalam penyerapan ini tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanyalah pemerintah yang

dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal. Dengan melihat keadaan tersebut maka dalam mengembangkan sektor industri kecil dapat dilakukan dengan menggunakan faktor internal dari industry yang meliputi tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal, serta pengeluaran tenaga kerja non upah (Simanjuntak, 1985).

2.1.11 Sektor Pekerjaan (Lapangan Usaha)

Sektor pekerjaan atau lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan /tempat bekerja/ kantor dimana seseorang bekerja. Dalam analisis ketenagakerjaan, pengelompokan sektor pekerjaan biasanya dilakukan sesuai dengan yang terdapat pada buku klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI).

Klasifikasi memuat penggolongan lapangan usaha terdiri dari :

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air minum
5. Bangunan
6. Perdagangan, restoran dan hotel
7. Angkutan, komunikasi
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah jasa dan perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan.

2.1.12 Sektor Unggulan Berperan Besar Dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Teori basis ekonomi di temukan oleh Richardson dalam Tambunan (2003), menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

Proses produksi di suatu daerah dengan sumber daya produksi lokal, termasuk tenaga kerja, bahan baku, dan outputnya di ekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut.

Dengan demikian, sektor unggulan yang kegiatannya menjual dan mencukupi barang dari luar daerah membutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi pasokan barang yang akan di ekspor keluar daerah. Hal tersebut menggambarkan peranan sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian yang penulis jadikan sebagai referensi :

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Kesimpulan
1	Yulastri Fridelsis (2007)	Analisis sektoral dalam menyerap tenaga kerja di Pekanbaru	Penelitian ini melakukan pendekatan analisis shift share dengan menggunakan data tenaga kerja selama kurun waktu enam tahun yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2004. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja di kota pekanbaru dan faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada masing-masing sektor tersebut. dapat diketahui strategi penciptaan kesempatan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode liberator yaitu metode yang menggunakan data-data sekunder dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini.

			Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif.
2	Putu Mahardika (2014)	Analisis sektor ekonomi basis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota Batu	Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor potensial dan untuk mengetahui sektor yang memiliki keunggulan komparatif serta criteria pertumbuhan sektorya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Alat analisis yang dipakai untuk penelitian kontribusi sectoral, LQ, Shift Share, MPR, dan Typologi klassen. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota batu berada pada puncak kemakmuran dari tahun 2008-2012, kota ini selalu mengalami peningkatan. Sektor yang patut dikembangkan di kota batu yaitu sektor pertanian, listrik gas dan air bersih, dan restoran, serta jasa-jasa. Karena dari keempat sektor tersebut cukup berkontribusi dalam pembentukan nilai PDRB kota batu
3	Dini Mardiana (2013)	Peranan Sektor Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru	Penelitian yang dilakukan Mardiana pada tahun (2013) yang berjudul “Peranan Sektor Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sektor basis di Kota Pekanbaru untuk mengetahui peranan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja dan angka elastisitas kesempatan kerja di Kota Pekanbaru. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu metode LQ (<i>Local Quetient</i>). Metode yang membandingkan PDRB Kota Pekanbaru terhadap PDRB provinsi Riau memberikan nilai LQ yang menunjukkan kegiatan ekonomi basis atau non basis pada Kota Pekanbaru. Serta menggunakan analisis elastisitas tenaga kerja dalam melihat peranan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Pekanbaru.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan hipotesis sebagai berikut

1. Diduga Sektor pertanian, perdagangan, transportasi, dan jasa-jasa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Karimun.
2. Diduga bahwa sektor unggulan berperan lebih besar dari pada sektor non unggulan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi ini dilakukan di Kabupaten Karimun, dimana Kabupaten Karimun merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, kota yang dinamis, mobilitas yang tinggi serta mempunyai peluang kerja yang besar jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang mempunyai ikatan dengan penelitian ini :

Adapun data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Karimun yaitu :

- Data pertumbuhan ekonomi
- Data PDRB Kabupaten Karimun
- Data jumlah penduduk
- Data tenaga kerja

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga tidak terdapat populasi dan sampel penelitian.

3.4 Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah dokumentasi, yaitu meneliti dokumen atau arsip dari instansi terikat yang berhubungan dengan penelitian, baik dalam bentuk bahan informasi maupun berupa data statistik

Tahun 2013 – 2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif untuk menganalisa data. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang membahas permasalahan dengan menguraikan dan menjelaskan sehingga gambaran yang menjelaskan yang sebenarnya, kemudian dikaitkan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan ini.

Untuk melihat besarnya peranan sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota pekanbaru dapat dianalisa dengan melihat hubungan antara persentase pertumbuhan tingkat tenaga kerja sektor unggulan dengan persentase pertumbuhan PDRB sektor unggulan. Dalam hal ini penulis menggunakan rumus elastisitas kesempatan kerja.

Untuk menentukan sektor yang menjadi sektor unggulan menggunakan formulasi location quotient (LQ). metode ini membandingkan antara pendapatan domestic regional bruto (PDRB) per sektor pada Kabupaten Karimun terhadap pendapatan domestic regional bruto provinsi riau, antara lain sebagai berikut ini :

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana nilai : LQ_i = Nilai LQ sektor i
 v_i = PDRB per sektor Kabupaten Karimun
 v_t = Total PDRB Kabupaten Karimun
 V_i = PDRB per sektor Provinsi Kepri
 V_t = Total PDRB Provinsi Kepri

Sumber : Tarigan (2004;78)

Untuk melihat besarnya peranan sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun dapat dianalisa dengan melihat hubungan antara persentase pertumbuhan tingkat tenaga kerja sektor unggulan dengan persentase pertumbuhan PDRB sektor unggulan. Dalam hal ini penulis menggunakan rumus elastisitas kesempatan kerja.

Elastisitas Kesempatan Kerja

$$= \frac{\% \text{Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Unggulan}}{\% \text{Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Unggulan}}$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian

Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999. Adapun secara geografis Kabupaten Karimun terbentang antara 00° 24' 36" LU sampai 01° 13' 12" LU dan 103° 13' 12" BT sampai 104° 00' 36" BT, tepat berada pada jalur pelayaran dan dekat dengan zona penerbangan internasional. Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.

Secara umum Pulau Karimun mempunyai dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga bagian yang berbukit-bukit dengan kemiringan sampai 400 serta ketinggian mencapai 500 meter. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Pulau Karimun. Kecamatan-kecamatan yang ada di Pulau Karimun ini juga mempunyai karakteristik yang hampir mirip.

Secara administratif Kabupaten Karimun terdiri dari 12 Kecamatan. Ibukota kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 di halaman berikut :

Tabel 4.1 Kecamatan di Kabupaten Karimun Menurut Luas dan Persentase Wilayah

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Moro	240.73	25,84
2	Kundur Utara	87.85	9,43
3	Kundur Barat	36.25	3,89
4	Karimun	25.35	2,72
5	Buru	51.71	5,55
6	Meral	66.46	7,13
7	Tebing	93.91	10,08
8	Meral Barat	132.37	14,21
9	Belat	35.71	3,83
10	Ungar	56.00	6,01
11	Durai	36.58	3,93
12	Kundur	68.65	7,37
	jumlah	931.57	100

Sumber : BPS Karimun Tahun 2017

Dari dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun, Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro merupakan kecamatan pertama di Kabupaten Karimun. Dengan adanya pemekaran tumbuhlah Kecamatan - kecamatan baru sehingga menjadi 12 Kecamatan, dan juga bertambah kekuasaan administrasi dan perangkat pemerintah Kabupaten Karimun, tetapi penambahan penduduk yang begitu pesat juga memerlukan perhatian yang lebih serius untuk mengatasi pengangguran karena sektor formal tidak dapat menampung jumlah angkatan kerja yang ada, dimana mereka di bombing bekerja pada sektor informal yang terarah menuju kemajuan tingkat taraf hidup yang lebih baik.

4.2 Sejarah Kabupaten Karimun

Dahulu, Karimun berada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya hingga keruntuhannya pada abad ke-13, dan pada masa itu pengaruh agama Budha mulai masuk. Hal ini dibuktikan dengan adanya Prasasti di Desa Pasir Panjang. Pada masa itu disebutkan Karimun sering dilalui kapal-kapal dagang hingga pengaruh Kerajaan Malaka (Islam) mulai masuk tahun 1414.

Pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, saat itu Sultan Mansyur Syah yang memerintah memberi larangan pada keturunan raja-raja untuk tinggal di Malaka, dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil, lalu muncullah kerajaan Indrasakti, Indrapura, Indragiri, dan Indrapuri. Sementara itu banyak rakyat Malaka yang tinggal berpencar di pulau-pulau yang berada di Kepulauan Riau termasuk Pulau Karimun. Sejak kejatuhan Malaka dan digantikan perannya oleh kerajaan Johor, Karimun dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menentang Portugis sejak masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah I (1518-1521) hingga Sultan Ala Jala Abdul Jalil Ri'ayat Syah (1559-1591).

Pada kurun waktu 1722-1784, Karimun berada dalam kekuasaan Kerajaan Riau-Lingga dan pada masa itu daerah Karimun, terutama Kundur dikenal sebagai penghasil gambir dan penghasil tambang (seperti : timah, granit, dll) dan Karimun berkembang menjadi daerah perdagangan serta mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Ali Haji.

Berdasarkan Surat Keputusan delegasi Republik Indonesia, provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No. 9/Deprt. menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom

Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 November 1965 No. UP/256/5/1965 menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah Administratif kawedanan dalam kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

4.3 Visi Kabupaten Karimun

Pernyataan visi yang dirumuskan aparat penyelenggara Kabupaten Karimun yaitu “Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

4.4 Perekonomian Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun semenjak dimekarkan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Dalam kurun waktu 18 tahun capaian pembangunan telah memenuhi harapan yang diinginkan dan telah berada dalam arah yang benar. Yaitu melalui program mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing, dengan sasaran terciptanya tenaga kerja yang terampil, iklim investasi yang kondusif, serta meningkatnya ketersediaan infrastruktur baik pelabuhan, jalan, maupun air bersih.

Bekerja sama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan pertanian, dengan tujuan mengembangkan sumberdaya perikanan dan pertanian, kewirausahaan, serta mengoptimalkan

potensi pariwisata. Hasilnya sektor pertanian telah memiliki kontribusi yang dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Karimun yakni sebesar 16,45%, kemudian meningkatnya produksi perikanan menjadi 71.317 ton, berkembangnya usaha kecil dan menengah, serta meningkatnya kunjungan wisatawan hingga mencapai 99.026 wisatawan.

4.5 Penduduk Kabupaten Karimun

Penduduk Kabupaten Karimun bersifat heterogen dengan latar belakang etnis, adat istiadat, agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya yang berbeda. Dari segi etnis, Kabupaten Karimun terdiri dari penduduk multi etnis. Kabupaten ini dihuni oleh etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar, Bugis, dan Cina serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun demikian etnis Melayu merupakan jumlah terbesar dan secara kebudayaan dominan. Hal ini karena kelompok etnis Melayu merupakan etnis asli daerah Kepri, sedangkan kelompok etnis lainnya merupakan imigran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Heterogenitas penduduk cukup mewarnai kehidupan sosial penduduk Kabupaten Karimun. Interaksi antar kelompok etnis yang berbeda pada hakekatnya relatif punya jarak sosial tertentu. Namun demikian, struktur sosialnya di dukung oleh norma – norma agama dan adat. Meskia kedua norma tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda dalam mengikat anggota masyarakatnya, norma agama, terutama norma agama islam yang banyak di anut oleh anggota masyarakat cukup dapat mempertautkan jarak sosial karena perbedaan etnis tersebut.

4.6 Penduduk dan Aspeknya

Penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan usaha untuk membangun sesuatu perekonomian. Tingkat perkembangan penduduk adalah mutlak untuk diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun sebagai evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan pembangunan. penduduk juga merupakan faktor terpenting dalam dinamika pembangunan, karena manusia sebagai modal dasar dan juga sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari pembangunan ekonomi nasional.

Penduduk Kabupaten Karimun telah mencapai kurang lebih 229.194 jiwa pada tahun 2017, hal ini menunjukkan Kabupaten Karimun sudah dapat dikategorikan sebagai Kabupaten besar jika di tinjau dari jumlah penduduk.

4.7 Perkembangan Penduduk

Dari hasil registrasi penduduk dalam beberapa tahun terakhir keadaan akhir tahun 2017, penduduk Kabupaten Karimun berjumlah 229.194 jiwa terdiri dari penduduk laki – laki sebanyak 116.737 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 112.457 jiwa, yang berarti mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2016 penduduk Kabupaten Karimun berjumlah 227.277 jiwa terdiri dari penduduk laki – laki sebanyak 115.814 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 111.463 jiwa.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan penduduk Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel di halaman berikut :

Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2017 (Jiwa)

Tahun	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
2013	112 825	108 057	220 882
2014	113 832	109 285	223 117
2015	114 922	110 376	225 298
2016	115 814	111 463	227 277
2017	116 737	112 457	229 194

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2017

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Karimun dapat dipengaruhi dan disebabkan karena :

1. Kabupaten Karimun merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, sehingga banyak aktivitas yang seperti pemerintahan, perekonomian, pendidikan, kesehatan dan industri. Hal ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menetap di pusat – pusat fasilitas.
2. Kabupaten Karimun terletak pada perbatasan dengan Negara Singapur dan Negeri Jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan.

4.8 Penyebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk mau tidak mau akan menimbulkan masalah kependudukan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya. Salah satu masalah kependudukan yang muncul yaitu mengenai masalah penyebaran dan tingkat kepadatan penduduk. Begitu juga dengan Kabupaten Karimun, dengan terjadinya penambahan penduduk di

Kabupaten Karimun mengakibatkan penyebaran yang tidak merata antara dua belas kecamatan yang ada.

Ketidak merataan ini akan menimbulkan masalah letak dan tata kota seperti perumahan, transportasi, pertokoan, sanitasi, fasilitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat melalui tabeli berikut :

Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun di Rinci per Kecamatan Keadaan Akhir Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Densitas (Jiwa/Km ²)
1	Moro	240.73	17.085	39
2	Kundur Utara	87.85	11.653	47
3	Kundur Barat	36.25	17.151	90
4	Karimun	25.35	43.909	732
5	Buru	51.71	8.884	121
6	Meral	66.46	43.074	708
7	Tebing	93.91	26.992	339
8	Meral Barat	132.37	14.424	218
9	Belat	35.71	6.115	57
10	Ungar	56.00	5.989	108
11	Durai	36.58	5.886	94
12	Kundur	68.65	28.032	338
Jumlah		931.57	227.277	148

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui kecamatan mana yang memiliki densitas penduduk yang terkecil yang ada di Kabupaten Karimun. Dimana wilayah kecamatan Karimun terbesar setelah kecamatan Meral yaitu berjumlah 732 jiwa/km². tingginya tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Karimun ini dikarenakan letaknya yang dekat dengan pusat Kota Tanjungbalai, yang mana kecamatan ini banyak terdapat perumahan penduduk, sedangkan kecamatan Meral memiliki tingkat kepadatan penduduk kedua setelah Karimun,

hal ini dikarenakan lahan banyak di bangun pasar, ruko – ruko serta sarana dan prasarana yang berguna untuk masyarakat umum.

Kecamatan Moro merupakan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah, dimana jumlah penduduk jarang dibandingkan dengan luas wilayah yang terluas, yaitu dengan luas 240.73 km², kecamatan moro memiliki kepadatan 39 jiwa/km².

Melihat kenyataan bahwa tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata pada kecamatan – kecamatan yang di Kabupaten Karimun, sekarang telah mulai dilakukan usaha untuk dapat lebih menyebarkan jumlah penduduk dari wilayah yang mempunyai penduduk yang padat ke wilayah yang mempunyai penduduk yang jarang, dimana usaha itu adalah dengan laksanakan pembangunan sarana pemukiman dan perumahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun developer swasta.

4.9 Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, salah satu contoh adalah tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya persediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa di ikuti dengan persediaan tenaga kerja yang cukup akan menimbulkan masalah pengangguran.

Sesuai dengan kehidupan masyarakat perkotaan yang dinamis, maka dalam hal lapangan usaha yang digelutinya terdapat keragaman. Keragaman dalam hal usaha inilah yang menggerakkan aktivitas ekonomi yang ada di perkotaan, begitu juga halnya yang terjadi di Kabupaten Karimun, masyarakatnya

mengeluti berbagai bidang usaha dalam menjalankan kehidupan, antara lain sektor pertanian, industry, bangunan, perdagangan, dan lain – lain.

Keanekaragaman lapangan usaha inilah yang akan memberikan alternatif pilihan yang lebih banyak bagi masyarakat untuk berusaha dalam rangka mendapatkan pendapatan yang nantinya akan di pergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara keseluruhan lapangan usaha yang digeluti oleh masyarakat di Kabupaten Karimun sebagai lapangan kerja dalam mencari nafkah dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menyajikan data lapangan usaha beserta jumlah penduduk yang bekerja pada bidang usaha tersebut.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Karimun Tahun 2017

No	Sektor Usaha	Jumlah (Jiwa)
1	Pertanian	20.210
2	Pertambangan	3.184
3	Industri	9.865
4	Listrik	616
5	Bangunan	11.493
6	Perdagangan	17.556
7	Angkutan	6.619
8	Keuangan	1.643
9	Jasa - jasa	23.893
Jumlah		95.079

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2017

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa lapangan usaha yang paling tidak dominan di Kabupaten Karimun di tahun 2017 ialah sektor Listrik dengan jumlah 616. Sedangkan sektor jasa – jasa menjadi lapangan usaha yang paling dominan di Kabupaten Karimun dengan jumlah 23.893.

4.10 Laju pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka mengevaluasi kinerja ekonomi suatu daerah, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat salah satu indikator guna mengevaluasi kinerja perekonomian dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dengan menggunakan analisis PDRB, dapat diketahui bagaimana perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dan seberapa besar kontribusi setiap sektor terhadap perekonomian Kabupaten Karimun, selain itu analisis PDRB juga bisa digunakan untuk mengukur PDRB perkapita serta pendapatan perkapita. Analisis keterbandingan antar Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Riau tentang laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Kepulauan Riau akan semakin memperluas gambaran perekonomian Kabupaten Karimun

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan terutama oleh daerah berkembang untuk mencapai target pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun dapat dilihat dari tabel pada halaman berikut :

Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun 2013 - 2017

No	Tahun	Pertumbuhan/PDRB (%)
1	2013	7.09
2	2014	6.87
3	2015	6.54
4	2016	6.17
5	2017	5.42

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2017

Perekonomian Kabupaten Karimun pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karimun tahun 2017 mencapai 5,42%.

Struktur ekonomi di Kabupaten Karimun tahun 2013 – 2017 di dominasi oleh tiga sektor yaitu sektor perdagangan, pertanian, dan Konstruksi walaupun tingkat dominasinya tidak stabil tetapi cukup untuk memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan perekonomian di Kabupaten Karimun.

Untuk mengetahui distribusi PDRB sektor Kabupaten Karimun atas dasar harga berlaku 2013 – 2017 dapat dilihat dari tabel di halaman berikut :

Tabel 4.6 Distribusi PDRB Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2017 (%)

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	17.36	16.95	16.67	16.45	15.42
2	Pertambangan	11.67	11.34	11.04	10.67	10.53
3	Industri	14.37	14.21	14.30	14.34	14.17
4	Listrik	0.31	0.27	0.25	0.27	0.29
5	Konstruksi	15.55	15.93	16.13	16.13	16.26
6	Perdagangan	16.85	17.43	17.76	18.26	18.84
7	Transportasi	3.41	3.74	3.98	4.16	4.34
8	Keuangan	1.68	1.67	1.67	1.64	1.66
9	Jasa – jasa	13.84	13.64	13.45	13.4	13.74
Total		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2017

Tabel pada halaman sebelumnya menunjukkan bahwa struktur Ekonomi Kabupaten Karimun tahun 2013 – 2017 di dominasi oleh empat sektor. Sektor tersebut yaitu perdagangan, konstruksi, pertanian, dan industri. Bahkan dominasi empat sektor tersebut cenderung naik setiap tahunnya. Tahun 2013 ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 64,13% dan di tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 64,69% dari total perekonomian Kabupaten Karimun.

Besarnya peran ke empat sektor tersebut dalam empat tahun terakhir terlihat di tahun 2017 peranan ke empat sektor tersebut memberikan andil sebesar 64,69% dari total perekonomian di Kabupaten Karimun. Dengan memperhatikan peran yang besar dari ke empat sektor tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Karimun dapat mengambil kebijakan yang dapat mendorong roda perekonomian di Kabupaten Karimun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Sektor Unggulan Kabupaten Karimun

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut. Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

5.1.1 Analisis Sistem LQ untuk Mengetahui Sektor Unggulan di Kabupaten Karimun

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu Negara selalu diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu Negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variable, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain – lain. Indonesia sebagai sebuah Negara dimana pembangunan nasionalnya pada hakikatnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan nasional, karena daya dukung ekonomi yang

terbatas. Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan ketenagakerjaan yang salah satu contohnya adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang diikuti kesempatan kerja yang tidak seimbang akan menimbulkan pengangguran.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan bagaimana peranan sumberdaya dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada sektor – sektor ekonomi, yang tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi rata – rata pertahun. Tercapai tidaknya kenaikan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam memberdayakan sumber – sumber daya alam dan manusia yang tersedia di daerah tersebut. Setiap daerah harus mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya dengan sektor ekonomi yang paling berperan dan yang paling unggul yang ada di daerahnya tujuannya untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut Tarigan (2004;28) untuk mengetahui apakah suatu sektor unggulan atau non unggulan dapat dipergunakan salah satu metode Local Quotient (LQ). Local Quotient dimaksudkan untuk mengukur derajat relatif spesialis suatu industri atau kelompok industri yang dimiliki suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Adapun hasil dari pencarian Local Quotient yang diidentifikasi dari sektor – sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Karimun dan agar lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil perhitungan Local Quotient pada tabel di halaman berikut :

Tabel 5.1 Local Quotient (LQ) Kabupaten Karimun tahun 2013 – 2017 (%)

No	Lapangan Usaha	Local Quotient (LQ)					Keterangan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertanian	4.04	4.80	4.69	4.85	4.63	Unggulan
2	Pertambangan	0.66	0.73	0.71	0.76	0.76	Non Unggulan
3	Industri	0.30	0.37	0.38	0.38	0.38	Non Unggulan
4	Listrik	0.27	0.31	0.30	0.31	0.33	Non Unggulan
5	Konstruksi	0.68	0.85	0.90	0.89	0.91	Non Unggulan
6	Perdagangan	2.01	2.41	2.29	2.16	2.18	Unggulan
7	Transportasi	1.07	1.35	1.37	1.38	1.42	Unggulan
8	Keuangan	0.52	0.65	0.63	0.61	0.60	Non Unggulan
9	Jasa – jasa	1.83	2.14	2.10	1.87	1.89	Unggulan

Sumber : Data Olahhan 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat yang menjadi sektor unggulan adalah sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa - jasa, dan Transportasi dalam 4 tahun terakhir angka LQ terbesar terdapat pada sektor pertanian pada tahun 2017 sebesar 4.630. Dilihat dari angka LQ tersebut bahwa perekonomian di Kabupaten Karimun di gerakkan oleh sektor primer dan sektor tersier. Sektor primer meliputi sektor pertanian, dan sektor tersier meliputi sektor perdagangan, transportasi dan jasa-jasa. Sektor yang mendominasi perekonomian Kabupaten Karimun merupakan salah satu ciri wilayah perkotaan. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa sektor perdagangan, sektor jasa – jasa, dan transportasi besar setiap LQ nya > 1 hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Tarigan dimana apabila $LQ > 1$ maka sektor tersebut adalah sektor basis atau unggulan. Walaupun unggulan yang paling potensial, namun sektor non unggulan juga harus dikembangkan untuk menjadi sektor unggulan yang baru bisa ditunjang dengan sektor unggulan yang ada.

5.1.2 PDRB Persektor Ekonomi di Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau

Setelah diketahui sektor mana saja yang menjadi unggulan di Kabupaten Karimun dengan menggunakan analisis LQ seperti yang dikemukakan Tarigan, kita dapat melihat faktor – faktor yang menyebabkan sektor unggulan tersebut adapun yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Karimun adalah sektor Pertanian, Perdagangan, Transportasi, dan sektor Jasa.

Dan untuk melihat faktor yang menentukan sektor unggulan di Kabupaten Karimun dapat kita lihat dari angka perbandingan PDRB yang diperoleh daerah dari waktu ke waktu seperti daerah lainnya. Dan untuk lebih jelasnya apa saja faktor yang menjadi penentu tersebut dapat kita melihatnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2 : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	1177229.15	1242005.08	1311368.16	1381325.52	1389627.16
2	Pertambangan	824733.34	853712.27	901944.30	936903.50	987424.03
3	Industri	945134.23	1017465.99	1097647.16	1171150.09	1232146.03
4	Listrik	19095.83	20544.99	21727.91	25184.31	28541.05
5	Konstruksi	977734.43	1078472.84	1167859.65	1265336.29	1365832.44
6	Perdagangan	1168950.79	1261388.48	1343167.31	1432804.05	1525701.95
7	Transportasi	229686.71	257042.89	281601.97	308197.90	335054.39
8	Keuangan	115720.75	122262.93	129232.96	134212.14	140768.35
9	Jasa – jasa	919939.68	969815.84	1018661.47	1069725.8	1140117.14
PDRB		6378224.91	6822711.31	7273210.89	7724839.6	8145212.54

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2017

Dilihat dari PDRB persektor ekonomi di akhir tahun 2017 sektor perdagangan adalah sektor dengan angka terbesar yaitu sebesar 1.525.701,95 juta ini dikarenakan pusat perdagangan yang ada di Kabupaten Karimun seperti, Pasar

Sri Karimun, Pasar Malam, Hawaii, Padimas, dan munculnya pusat perdagangan baru seperti Pasar Puan Maimun dan Indo PN yang ada di Kabupaten Karimun.

Selain itu juga ada sektor pertanian dengan angka sebesar 1.389.627,16 juta hal ini dikarenakan bahwa hasil pertanian di Kabupaten Karimun yang menonjol secara turun temurun adalah Durian, Karet, Kelapa, Sagu, Rambutan, Gambir serta palawija dan budidaya ikan darat. Karena sektor pertanian menjadi sumber favorit, maka hal ini perlu di kelola dan di awasi dengan baik untuk mencegah masuknya barang impor.

Untuk menentukan LQ juga dapat dilihat dari perbandingan PDRB di Provinsi Kepulauan Riau yang dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	1.294.891,74	1.374.015,33	1.455.611,65	1.497.319,34	1.497.319,34
2	Pertambangan	5.559.527,05	6.175.216,17	6.555.070,97	6.465.085,50	6.465.085,5
3	Industri	13.685.989,88	14.495.493,11	15.068.604,12	16.016.902,96	16.016.902,96
4	Listrik	311.999,15	350.749,76	371.910,99	428.048,67	428.048,67
5	Konstruksi	6.325.399,35	6.705.003,65	6.767.413,75	7.412.399,09	7.412.399,09
6	Perdagangan	2.580.015,77	2.773.195,58	3.051.045,74	3.489.340,70	3.489.340,7
7	Transportasi	948.709,77	1.006.398,38	1.065.366,84	1.173.764,78	1.173.764,78
8	Keuangan	988.409,56	1.001.041,37	1.066.078,27	1.155.630,89	1.155.630,89
9	Jasa – jasa	2.227.115,72	2.408.327,24	2.520.964,54	2.997.796,8	2.997.796,84
	PDRB	28.362.530,94	36.289.440,59	37.922.066,87	40.636.288,8	40.636.288,77

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Seperti dilihat di atas pada akhir tahun 2017 sektor dengan angka terbesar dipegang oleh sektor industri dengan angka 16.016.902.96 juta dan sektor konstruksi sebesar 7.412.399.09 juta. Dikarenakan kedua sektor merupakan sektor

yang sangat berkembang seperti dengan adanya beberapa industri kertas, logam, mesin, dan elektronika.

5.1.3 Perkembangan PDRB Sektor Ekonomi Unggulan

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama – sama dengan masyarakat daerah, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat di daerah dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB dapat dilihat sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor – sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi.

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, PDRB dapat diartikan pula sebagai suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita menjadi salah satu indikator kemakmuran penduduk di suatu daerah dan bila di tampilkan secara berkala dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan tingkat kemakmuran yang terjadi di daerah tersebut. Hasil perhitungan PDRB disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita berarti semakin tinggi kekayaan

daerah (*region prosperity*) di daerah tersebut, dengan kata lain nilai PDRB perkapita di anggap merefleksikan tingkat kekayaan daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Di Kabupaten Karimun dari tahun 2013 sampai tahun 2017, jumlah PDRB Kabupaten Karimun teru mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kapasitas produksi dan proses ekonomi yang terus bergerak di Kabupaten Karimun. Dengan hadirnya titik – titik perekonomian yang baru tentunya akan memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan PDRB Kabupaten Karimun.

Kondisi sektor ekonomi unggulan akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian di Kabupaten Karimun yang dari tahun 2013 – 2017 mengalami pertumbuhan, hal ini dapat dilihat dari angka PDRB sektor unggulan Kabupaten Karimun, dimana pertumbuhan PDRB sektor unggulan berdasarkan harga konstan mengalami perubahan walaupun tidak terlalu signifikan. Untuk mengetahui

pertumbuhan PDRB perkapita sektor ekonomi unggulan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel di halaman berikut :

Tabel 5.4 : Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Karimun Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
		Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	2013	7.733,2	6.744,3	-	-
2	2014	8.618,5	7.207,3	11,44	6,86
3	2015	9.632,1	7.678,5	11,76	6,53
4	2016	10.610,2	8.152,1	10,15	6,16
5	2017	11.648,2	9.173,3	9,78	12,52

Sumber : BPS Karimun, 2017 dan Data Olahan

Tabel di atas terlihat bahwa PDRB perkapita sektor unggulan atas dasar harga berlaku dari tahun 2013 – 2017 terus mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2013 PDRB perkapita sektor unggulan atas dasar harga berlaku sebesar 7.733,2 miliar rupiah dan ditahun 2017 angka ini meningkat secara signifikan yaitu sebesar 11.648,2 miliar rupiah, angka ini hampir naik dua kali lipat dari tahun 2013 tersebut.

Seiring dengan kenaikan dengan PDRB perkapita sektor unggulan atas dasar harga berlaku, PDRB perkapita sektor unggulan atas dasar harga konstan Kabupaten Karimun juga meningkat, tahun 2013 tercatat sebesar 6.744,3 miliar rupiah dan di tahun 2017 angka ini naik menjadi 9.173,3 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Karimun, dapat dilihat dari berkembangnya PDRB Kabupaten karimun. Peningkatan data PDRB Kabupaten Karimun yang terlihat jelas peningkatannya pada Tahun 2017, jika dibandingkan dengan data Tahun 2013 di PDRB Kabupaten Karimun.

Tabel 5.5 : Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Karimun Tahun 2013 – 2017 (%)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	5.56	5.50	5.58	5.33	0.60
2	Perdagangan	8.70	7.91	6.48	6.67	6.48
3	Transportasi	11.18	11.91	9.55	9.44	8.71
4	Jasa-jasa	5.03	5.42	5.04	5.01	6.58

Sumber : BPS Karimun, 2017

Pertumbuhan dari empat sektor tersebut bahkan terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Dari kontribusi ke empat sektor tersebut dan dengan memperhatikan peran yang besar dari ke empat sektor tersebut diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang dapat mendorong roda perekonomian di Kabupaten Karimun.

Untuk mengetahui persentase sektor unggulan di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.6 : Jumlah Tenaga Kerja Sektor Unggulan Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Karimun Tahun 2013 - 2017

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	31.467	29.943	27.363	24.932	20.210
2	Perdagangan	11.366	12.324	13.743	15.329	17.556
3	Transportasi	3.867	4.193	4.721	5.537	6.619
4	Jasa-jasa	10.482	11.824	13.948	17.615	23.893

Sumber : BPS Karimun, 2017

Dari tabel di atas dapat terlihat jumlah tenaga kerja di Kabupaten Karimun mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya, pada tahun 2017 sektor jasa-jasa dengan jumlah tenaga kerja tertinggi yaitu 23.893, sedangkan pada sektor transportasi yang menjadi tenaga kerja terendah yaitu 6.619.

5.2 Peranan Sektor Unggulan Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Karimun

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup dalam pengembangan perekonomian suatu daerah tanpa diiringi oleh penggunaan tenaga kerja yang tinggi (*full employment*) demi tercapainya tujuan utama dari kebijakan pembangunan perekonomian. Tenaga kerja adalah jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan tertentu dalam satu kesatuan pekerjaan. Untuk membantu melakukan semua pekerjaan yang membutuhkan Tenaga Kerja diperlukan Sumber Daya Manusia yang tepat, dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan beban tugas. Untuk mengetahui pertumbuhan tenaga kerja sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Karimun tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel di halaman berikut :

Tabel 5.7 : Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Karimun Tahun 2013 – 2017

Tahun	Tenaga Kerja (orang)	Pertambahan	Pertumbuhan (%)
2013	6.561	-	-
2014	9.818	3.257	49.64
2015	10.477	659	6.71
2016	10.903	426	4.07
2017	11.272	369	3.38

Sumber : BPS Karimun, 2017 dan Data Olahan

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah tenaga kerja pada sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Karimun dari tahun 2013 – 2017 yang mengalami perubahan peningkatan baik itu peningkatan yang besar maupun yang kecil.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 9.818 orang bertambah 3.257 atau naik sebesar 49,64%, sedangkan peningkatan terkecil

jumlah tenaga kerja pada sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Karimun terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 11.272 orang bertambah 369 atau naik sebesar 3,38%.

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Dengan diketahui persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor ekonomi unggulan dan persentase pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan seperti yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat diketahui peranan sektor ekonomi unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun dengan menggunakan konsep elastisitas kesempatan kerja.

$$Elastisitas\ Kesempatan\ Kerja = \frac{\% \text{ Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Regional}}{\% \text{ Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Unggulan}}$$

Dengan menggunakan konsep tersebut dapat diketahui bagaimana hubungan antara sektor ekonomi unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun yang dapat diserap. Untuk mengetahui hasil rekapitulasi perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.8 : Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	-3.58	-4.84	-8.62	-8.88	-18.94
2	Perdagangan	6.08	8.69	11.24	11.54	14.53
3	Transportasi	7.3	8.43	12.59	17.28	19.54
4	Jasa-jasa	8.15	12.8	17.96	26.29	35.64

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2017 dan Data Olahan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor ekonomi unggulan dapat menyerap tenaga kerja yang mengalami penambahan dan pengurangan, pada tahun 2017 sektor pertanian mengalami penurunan tenaga kerja sebanyak 18,94%. Dan sektor yang terbanyak menyerap tenaga kerja yaitu pada sektor jasa-jasa sebanyak 35,64%

Tabel 5.9 : Hasil Perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Karimun

No	Sektor	Tenaga Kerja (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Elastisitas (%)
1	Pertanian	-18.94	0.60	-31.57
2	Perdagangan	14.53	6.48	2.24
3	Transportasi	19.54	8.71	2.24
4	Jasa-jasa	35.64	6.58	5.42

Sumber : BPS Karimun, 2017 dan Data Olahan

Dari hasil perhitungan elastisitas kesempatan kerja, dapat kita ketahui sektor ekonomi unggulan mana yang memiliki nilai elastisitas tenaga kerja yang besar dari satu (>1) dan kecil dari satu (<1) seperti berikut :

A. Peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun

Angka pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pada tahun 2017 memiliki angka pertumbuhan ekonomi sebesar 0,60% dan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan konsep elastisitas kesempatan kerja di dapatlah angka elastisitas sektor pertanian sebesar -31,57%. Dimana dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian tidak elastis antara pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja yang diserapnya sebesar -31,57% dimana angka tersebut kecil dari 1 ($-31,57 < 1$), yang artinya

apabila terjadi perubahan PDRB sektor pertanian sebanyak 1% maka akan mengakibatkan perubahan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian akan mengalami penurunan sebesar 31,57%.

B. Peranan sektor perdagangan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun

Angka pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan pada tahun 2017 memiliki angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,48% dan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan konsep elastisitas kesempatan kerja di dapatlah angka elastisitas sektor perdagangan sebesar 2,24%. Dimana dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan elastis antara pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dengan jumlah tenaga kerja yang diserapnya sebesar 2,24% dimana angka tersebut besar dari 1 ($2,24 > 1$), yang artinya apabila terjadi perubahan PDRB sektor perdagangan sebanyak 1% maka akan mengakibatkan perubahan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perdagangan akan mengalami perkembangan sebesar 2,24%.

C. Peranan sektor transportasi dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun

Angka pertumbuhan ekonomi sektor transportasi pada tahun 2017 memiliki angka pertumbuhan ekonomi sebesar 8,71% dan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan konsep elastisitas kesempatan kerja di dapatlah angka elastisitas sektor transportasi sebesar 2,24%. Dimana dapat disimpulkan bahwa sektor transportasi elastis antara pertumbuhan ekonomi sektor transportasi dengan jumlah tenaga kerja yang diserapnya sebesar

2,24% dimana angka tersebut besar dari 1 ($2,24 > 1$), yang artinya apabila terjadi perubahan PDRB sektor transportasi sebanyak 1% maka akan mengakibatkan perubahan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perdagangan akan mengalami perkembangan sebesar 2,24%.

D. Peranan sektor jasa-jasa dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun

Angka pertumbuhan ekonomi sektor jasa-jasa pada tahun 2017 memiliki angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,58% dan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan konsep elastisitas kesempatan kerja di dapatlah angka elastisitas sektor jasa-jasa sebesar 5,42%. Dimana dapat disimpulkan bahwa sektor jasa-jasa elastis antara pertumbuhan ekonomi sektor jasa-jasa dengan jumlah tenaga kerja yang diserapnya sebesar 5,42% dimana angka tersebut besar dari 1 ($5,42 > 1$), yang artinya apabila terjadi perubahan PDRB sektor jasa-jasa sebanyak 1% maka akan mengakibatkan perubahan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perdagangan akan mengalami perkembangan sebesar 5,42%.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa ternyata sektor ekonomi mempunyai peranan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun. Melalui pengujian elastisitas kesempatan kerja dengan pendekatan tenaga kerja dengan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), diperoleh angka elastisitas masing – masing ekonomi.

Oleh sebab itu hipotesis yang dikemukakan sebelumnya diterima yaitu:

1. Angka elastisitas kesempatan kerja sektor pertanian sebesar -31,57%, sektor perdagangan sebesar 2,24%, sektor transportasi sebesar 2,24%, sektor jasa-jasa 5,42%. Artinya apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor ekonomi berubah 1% maka tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 31,57%, sektor perdagangan naik 2,24%, sektor transportasi naik sebesar 2,24% dan sektor jasa-jasa naik sebesar 5,42%.
2. Sektor unggulan berperan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karimun. Artinya semakin berkembang sektor ekonomi unggulan maka dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja akan semakin berkembang.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya serta hasil yang diperoleh, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sektor Unggulan di Kabupaten Karimun yang di analisa Melalui pengujian LQ ialah Sektor pertanian, perdagangan, jasa-jasa, dan sektor transportasi. Sedangkan yang termasuk sektor non unggulan ialah sektor pertambangan, industri, listrik, konstruksi, dan keuangan.
2. Melalui pengujian elastisitas kesempatan kerja sektor ekonomi unggulan dengan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka diperoleh angka elastisitas sektor ekonomi unggulan mana saja dalam tahun 2013 – 2017 yang tertera pada table 5.9 yaitu hasil perhitungan elastisitas kesempatan kerja sektor ekonomi unggulan pada halaman 56 yang merupakan sektor elastis dan tidak elastis seperti sektor yang mempunyai angka elastisitas lebih dari 1 yaitu elastisitas sektor perdagangan sebesar 2.24%, elastisitas sektor transportasi sebesar 2.24%, dan pada sektor jasa-jasa merupakan angka elastisitas terbesar pada tahun 2017 terakhir yaitu dengan angka elastisitas sektor jasa-jasa sebesar 5.42%. Sedangkan pada sektor pertanian termasuk sektor yang tidak elastis dengan angka elastisitas sebesar -31,57%, hal ini disebabkan karena angkatan kerja muda cenderung lebih tertarik untuk bekerja di

sektor non pertanian, mengakibatkan turunnya daya tampung tenaga kerja di sektor pertanian dan relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian dibanding sektor non pertanian.

6.2 Saran

Selain kesimpulan di atas penulis juga mengajukan beberapa saran terkait dengan penelitian ini antara lain, yaitu :

1. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Karimun dalam hal menyerap tenaga kerja untuk lebih mengutamakan keahlian di bidangnya masing – masing agar memperhatikan sektor – sektor unggulan yang ada sehingga dapat dikembangkan dan dapat menghasilkan pendapatan yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Karimun.
2. Perlunya pengembangan infrastruktur di sektor unggulan tersebut agar dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut. Terkait pada turunnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian perlu dilakukan perluasan lahan pertanian, pengembangan investasi pada kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sehingga mampu menarik tenaga kerja muda dan berpendidikan relatif tinggi.
3. Salah satu kebijakan yang perlu di ambil oleh pemerintah yaitu berperan dalam peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan agar mempunyai produktivitas tenaga kerja yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

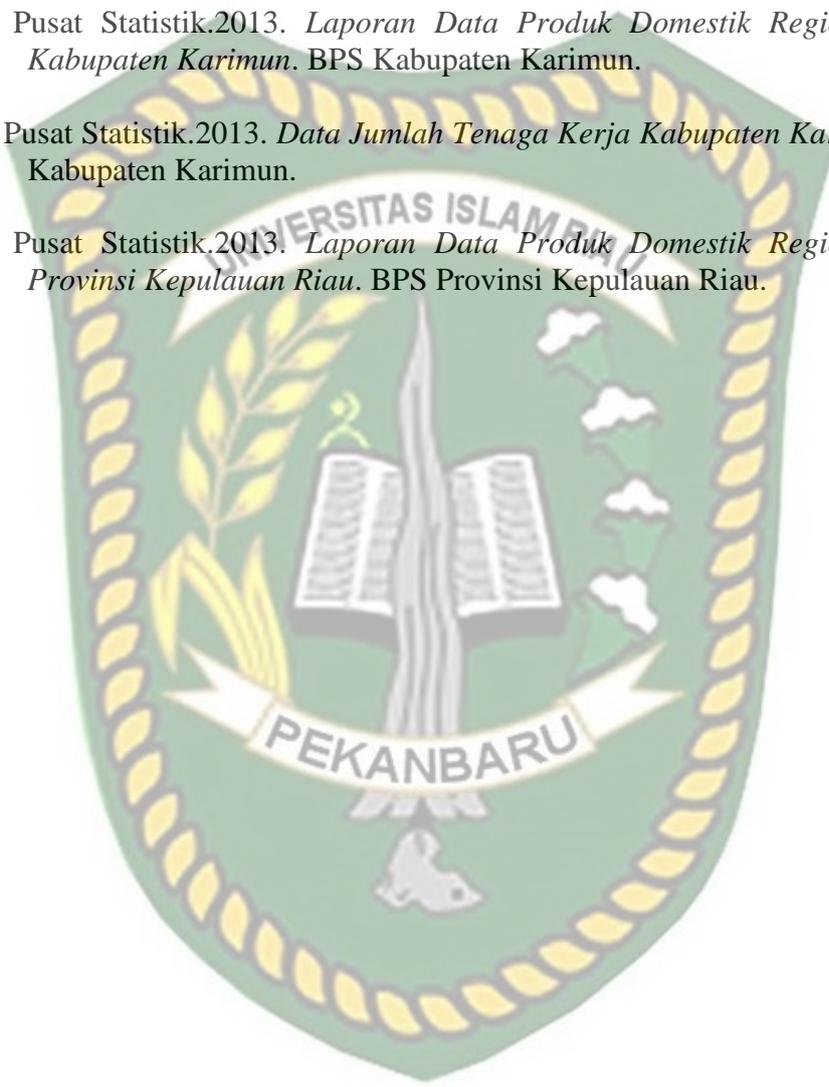
- Dahuri, 2004, *Ekonomi Regional*, LP-FE UI, Jakarta.
- Dumairy, 2006, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Ghufron, Muhammad, 2008, *Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Husni, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jhingan, ML, 2003, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nanga, Muana, 2005, *Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan*, PT. Raja Grafindo Persada
- Rokhedi, 2012, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Ketenagakerjaan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Simanjuntak, Payaman J, 2001, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Edisi 2001, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI : Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah, 2003, *Produktivitas : Apa dan Bagaimana*, PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2004, *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta.
- Sumarsono, Sony, 2003, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Suroto, 2002, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus, 2001, *Transformasi Ekonomi Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tarigan, Robinson, 2004, *Ekonomi Regional*, Bumi Aksara, Jakarta.

Todaro, M.P, 1984, *Ilmu Ekonomi : Bagi Negara sedang Berkembang, Suatu Pengantar Mengenai Dasar-Dasar Masalah-Masalah dan Kebijakan dalam Pengembangan*, Buku I. Akademika Pressindo, Jakarta.

Badan Pusat Statistik.2013. *Laporan Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun*. BPS Kabupaten Karimun.

Badan Pusat Statistik.2013. *Data Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Karimun*. BPS Kabupaten Karimun.

Badan Pusat Statistik.2013. *Laporan Data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau*. BPS Provinsi Kepulauan Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Lampiran 1

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	1177229.15	1242005.08	1311368.16	1381325.52	1389627.16
2	Pertambangan	824733.34	853712.27	901944.30	936903.50	987424.03
3	Industri	945134.23	1017465.99	1097647.16	1171150.09	1232146.03
4	Listrik	19095.83	20544.99	21727.91	25184.31	28541.05
5	Konstruksi	977734.43	1078472.84	1167859.65	1265336.29	1365832.44
6	Perdagangan	1168950.79	1261388.48	1343167.31	1432804.05	1525701.95
7	Transportasi	229686.71	257042.89	281601.97	308197.90	335054.39
8	Keuangan	115720.75	122262.93	129232.96	134212.14	140768.35
9	Jasa – jasa	919939.68	969815.84	1018661.47	1069725.8	1140117.14
	PDRB	6378224.91	6822711.31	7273210.89	7724839.6	8145212.54

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2017

Lampiran 2

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
(Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	1.294.891,74	1.374.015.33	1.455.611.65	1.497.319.34	1.497.319.34
2	Pertambangan	5.559.527.05	6.175.216.17	6.555.070.97	6.465.085.50	6.465.085.5
3	Industri	13.685.989.88	14.495.493.11	15.068.604.12	16.016.902.96	16.016.902.96
4	Listrik	311.999.15	350.749.76	371.910.99	428.048.67	428.048.67
5	Konstruksi	6.325.399.35	6.705.003.65	6.767.413.75	7.412.399.09	7.412.399.09
6	Perdagangan	2.580.015.77	2.773.195.58	3.051.045.74	3.489.340.70	3.489.340.7
7	Transportasi	948.709.77	1.006.398.38	1.065.366.84	1.173.764.78	1.173.764.78
8	Keuangan	988.409.56	1.001.041.37	1.066.078.27	1.155.630.89	1.155.630.89
9	Jasa – jasa	2.227.115.72	2.408.327.24	2.520.964.54	2.997.796.8	2.997.796.84
	PDRB	28.362.530.94	36.289.440.59	37.922.066.87	40.636.288.8	40.636.288.77

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Lampiran 3

Local Quotient (LQ) Kabupaten Karimun Tahun 2013 – 2017

(Persen)

No	Lapangan Usaha	Local Quotient (LQ)					Keterangan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertanian	4.043	4.808	4.697	4.853	4.630	Unggulan
2	Pertambangan	0.660	0.735	0.717	0.762	0.762	Non Unggulan
3	Industri	0.307	0.373	0.380	0.385	0.384	Non Unggulan
4	Listrik	0.272	0.312	0.305	0.310	0.333	Non Unggulan
5	Konstruksi	0.687	0.856	0.900	0.898	0.919	Non Unggulan
6	Perdagangan	2.015	2.419	2.295	2.160	2.181	Unggulan
7	Transportasi	1.077	1.358	1.378	1.381	1.424	Unggulan
8	Keuangan	0.521	0.650	0.632	0.611	0.608	Non Unggulan
9	Jasa – jasa	1.837	2.142	2.107	1.877	1.897	Unggulan

Sumber : Data Olahan 2018

Lampiran 4

Perhitungan Local Quotient

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

1. LQ tahun 2013

a. Sektor Pertanian

$$LQ = \frac{1177229.15/6378224.91}{1.294.891.74/28362530.94} = 4,043$$

b. Sektor Pertambangan

$$LQ = \frac{824733.34/6378224.91}{5.559.527.05/28362530.94} = 0,660$$

c. Sektor Industri

$$LQ = \frac{945134.23/6378224.91}{13.685.989.88/28362530.94} = 0,307$$

d. Sektor listrik

$$LQ = \frac{19095.83/6378224.91}{311.999.15/28362530.94} = 0,272$$

e. Sektor Konstruksi

$$LQ = \frac{977734.43/6378224.91}{6.325.399.35/28362530.94} = 0,687$$

f. Sektor Perdagangan

$$LQ = \frac{1168950.79/6378224.91}{2.580.015.77/28362530.94} = 2,015$$

g. Sektor Transportasi

$$LQ = \frac{229686.71/6378224.91}{948.709.77/28362530.94} = 1,077$$

h. Sektor Keuangan

$$LQ = \frac{115720.75/6378224.91}{988.409.56/28362530.94} = 0,521$$

i. Sektor Jasa – jasa

$$LQ = \frac{919939.68/6378224.91}{2227115.72/28362530.94} = 1,837$$

2. LQ tahun 2014

a. Sektor Pertanian

$$LQ = \frac{1242005.08/6822711.31}{1374015.33/36289440.59} = 4,808$$

b. Sektor Pertambangan

$$LQ = \frac{853712.27/6822711.31}{6175216.17/36289440.59} = 0,735$$

c. Sektor Industri

$$LQ = \frac{1017465.99/6822711.31}{14495493.11/36289440.59} = 0,373$$

d. Sektor listrik

$$LQ = \frac{20544.99/6822711.31}{350749.76/36289440.59} = 0,312$$

e. Sektor Konstruksi

$$LQ = \frac{1078472.84/6822711.31}{6705003.65/36289440.59} = 0,856$$

f. Sektor Perdagangan

$$LQ = \frac{1261388.48/6822711.31}{2773195.58/36289440.59} = 2,419$$

g. Sektor Transportasi

$$LQ = \frac{257042.89/6822711.31}{1006398.38/36289440.59} = 1,358$$



h. Sektor Keuangan

$$LQ = \frac{122262.93/6822711.31}{1001041.37/36289440.59} = 0,650$$

i. Sektor Jasa – jasa

$$LQ = \frac{969815.84/6822711.31}{2408327.24/36289440.59} = 2,142$$

3. LQ tahun 2015

a. Sektor Pertanian

$$LQ = \frac{1311368.16/7273210.89}{1455611.65/37922066.87} = 4,697$$

b. Sektor Pertambangan

$$LQ = \frac{901944.30/7273210.89}{6555070.97/37922066.87} = 0,717$$

c. Sektor Industri

$$LQ = \frac{1097647.16/7273210.89}{15068604.12/37922066.87} = 0,380$$

d. Sektor listrik

$$LQ = \frac{21727.91/7273210.89}{371910.99/37922066.87} = 0,305$$

e. Sektor Konstruksi

$$LQ = \frac{1167859.65/7273210.89}{6767413.75/37922066.87} = 0,900$$

f. Sektor Perdagangan

$$LQ = \frac{1343167.31/7273210.89}{3051045.74/37922066.87} = 2,295$$

g. Sektor Transportasi



$$LQ = \frac{281601.97/7273210.89}{1065366.84/37922066.87} = 1,378$$

h. Sektor Keuangan

$$LQ = \frac{129232.96/7273210.89}{1066078.27/37922066.87} = 0,632$$

i. Sektor Jasa – jasa

$$LQ = \frac{1018661.47/7273210.89}{2520964.54/37922066.87} = 2,107$$

4. LQ tahun 2016

a. Sektor Pertanian

$$LQ = \frac{1381325.52/7724839.6}{1497319.34/40636288.8} = 4,853$$

b. Sektor Pertambangan

$$LQ = \frac{936903.50/7724839.6}{6465085.50/40636288.8} = 0,762$$

c. Sektor Industri

$$LQ = \frac{1171150.09/7724839.6}{16016902.96/40636288.8} = 0,385$$

d. Sektor listrik

$$LQ = \frac{25184.31/7724839.6}{428.048.67/40636288.8} = 0,310$$

e. Sektor Konstruksi

$$LQ = \frac{1265336.29/7724839.6}{7412399.09/40636288.8} = 0,898$$

f. Sektor Perdagangan

$$LQ = \frac{1432804.05/7724839.6}{3489340.70/40636288.8} = 2,160$$

g. Sektor Transportasi

$$LQ = \frac{308197.90/7724839.6}{1173764.78/40636288.8} = 1,381$$

h. Sektor Keuangan

$$LQ = \frac{134212.14/7724839.6}{1155630.89/40636288.8} = 0,611$$

i. Sektor Jasa – jasa

$$LQ = \frac{1069725.8/7724839.6}{2997796.8/40636288.8} = 1,877$$

5. LQ tahun 2017

a. Sektor Pertanian

$$LQ = \frac{1389627.16/8145212.54}{1497319.34/40636288.77} = 4,630$$

b. Sektor Pertambangan

$$LQ = \frac{987424.03/8145212.54}{6465085.5/40636288.77} = 0,762$$

c. Sektor Industri

$$LQ = \frac{1232146.03/8145212.54}{16016902.96/40636288.77} = 0,384$$

d. Sektor listrik

$$LQ = \frac{28541.05/8145212.54}{428.048.67/40636288.77} = 0,333$$

e. Sektor Konstruksi

$$LQ = \frac{1365832.44/8145212.54}{7412399.09/40636288.77} = 0,919$$

f. Sektor Perdagangan



$$LQ = \frac{1525701.95/8145212.54}{3489340.7/40636288.77} = 2,181$$

g. Sektor Transportasi

$$LQ = \frac{335054.39/8145212.54}{1173764.78/40636288.77} = 1,424$$

h. Sektor Keuangan

$$LQ = \frac{140768.35/8145212.54}{1155630.89/40636288.77} = 0,608$$

i. Sektor Jasa – jasa

$$LQ = \frac{1140117.14/8145212.54}{2997796.84/40636288.77} = 1,897$$





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau